

BAB II
SEBAB-SEBAB DIGUNAKANNYA DIPLOMASI
DALAM MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(1946 – 1949)

A. Konflik Terjadi Berkelanjutan

Lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan buah suatu perjuangan kemerdekaan oleh seluruh rakyat. Kemerdekaan harus terus dipertahankan demi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Rakyat dan bangsa Indonesia yang selama lebih dari 350 tahun menderita lahir batin berkepanjangan akibat penjajahan bangsa Belanda. Penderitaan yang sekian lama tersebut telah membangkitkan kesadaran dirinya untuk merdeka. Kesadaran akan harga diri sebagai bangsa untuk berjuang mengusir penjajah dari Bumi Nusantara. Kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk penjajahan asing. Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah kebebasan dalam segala hal agar bisa membangun kembali bangsa tanpa campur tangan penjajah. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, Belanda masih menghendaki Indonesia tetap menjadi bagian dari negaranya. Belanda yang sudah bertahun-tahun lamanya mencengkeram dan menanamkan kekuasaannya di Indonesia tidak dengan suka rela bersedia melepaskan kekuasaan itu.¹

Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, ternyata dunia internasional belum sepenuhnya mengakuinya. Walaupun Indonesia telah merdeka, Belanda masih berkuasa atas beberapa daerah di Indonesia

¹ Soe Hoek Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang, hlm.129-130.

seperti: Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Padang, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lain. Daerah-daerah tersebut tidak akan dikembalikan kepada Indonesia. Belanda menganggap kekuasaannya sudah tertanam lama di daerah tersebut.

Keengganan Belanda menyerahkan daerah-daerah tersebut memicu terjadinya perlawanan di seluruh pelosok negeri. Rakyat menghendaki agar Belanda menyerahkan daerah-daerah dan pulau-pulau yang dikuasai dikembalikan ke Indonesia. Rakyat berpendapat bahwa daerah-daerah itu merupakan bagian wilayah Indonesia yang sah. Selama enam bulan setelah berdirinya Republik terjadilah pertempuran di mana-mana. Pertempuran sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Insiden pertama kali terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato di Tunjungan Surabaya. Pertempuran terjadi karena para pemuda Indonesia tidak bisa menerima pengibaran bendera Belanda yang dilakukan oleh sejumlah bekas interniran. Pertempuran bermula dari perobekan bendera Belanda oleh Arek-arek Suroboyo. Peristiwa ini kemudian disusul dengan perkelahian massal antara orang-orang Belanda yang dibantu orang Indo-Belanda melawan pemuda-pemuda Indonesia.

G. Moedjanto dalam karangannya yang berjudul *Indonesia Abad ke-20 Jilid I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, mengatakan bahwa :

Pemuda dan rakyat menganggap pelepasan Huyer ada hubungannya dengan penyebaran Pamphlet oleh pihak Inggris. Karena itu kecurigaan terhadap Inggris sebagai kaki tangan NICA semakin menjadi-jadi. Keadaan menjadi tegang, ketegangan itu bertambah-tambah dengan adanya pelakat-pelakat yang isinya senada dengan selebaran. Pada tanggal 27 Oktober itu pula terjadi pendudukan gedung-gedung penting oleh Inggris. Lebih jelek lagi pada keesokan harinya tentara Inggris merampas mobil-mobil termasuk mobil-mobil pribadi. Pemuda dan rakyat Surabaya sudah bertekad mempertahankan diri : "Sadu muk bathuk senyari bumi ditohi pati "(lebih baik mati terhormat daripada hidup menanggung malu). Arek-arek Suroboyo menganggap kemerdekaan dalam bahaya karena itu mereka sesuai dengan nama asalnya harus "suro ing boyo"(berani menghadapi bahaya) pada tanggal 28 Oktober sore harinya pertempuran tidak dapat dihindarkan.²

Pertempuran serupa yang terjadi di Surabaya juga terjadi di beberapa daerah seperti: Bandung dan Semarang. Pertempuran di Bandung mengenai persoalan persenjataan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pemuda-pemuda mengadakan aksi boikot terhadap bekas internir Belanda. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pemuda-pemuda menyerbu pabrik senjata di

² Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 dari Perang Dunia Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta : Kanisius.hlm.115

Kiaracondong Bandung. Sayang kemenangan belum berpihak kepada pemuda Indonesia.

Di Jawa Tengah pertempuran terjadi karena adanya pengambil alihan kekuasaan. Perebutan bangunan pemerintahan di Surakarta, perusahaan-perusahaan gula di Sragen dan Klaten. Pertempuran yang terjadi di Semarang karena adanya aksi balas dendam terhadap pihak Jepang yang dengan semena-mena melakukan penangkapan dan pembunuhan sejumlah pemuda Indonesia. Jelaslah sudah bahwa pertempuran yang terjadi di berbagai kota besar di Jawa merupakan aksi perlawanan rakyat mengusir penjajah yang tidak mau angkat kaki dari Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Melihat terjadinya pertempuran diberbagai kota, pemerintah berpendapat bahwa pertempuran harus dihentikan.

Jika dibiarkan akan menimbulkan akibat yang lebih besar lagi yang justru akan merugikan bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan baru dengan jalan perundingan. Berunding dengan Belanda agar tercipta perdamaian bagi bangsa Indonesia. Menurut Pemerintah Indonesia cara tersebut lebih elegan dan bermartabat.

B. Keadaan Politik Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan diproklamasikan keadaan politik Indonesia tidak otomatis stabil. Ketidakstabilan politik karena adanya konflik yang

terjadi di berbagai daerah, hal inilah yang memengaruhi situasi politik Indonesia setelah kemerdekaan. Situasi politik memburuk akibat adanya konflik dengan Belanda. Konflik terjadi akibat adanya kesadaran rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Rakyat bertekad bahwa kemerdekaan harus tetap dipertahankan apa pun akibatnya. Pada awal-awal pemerintahan Indonesia, keadaan Indonesia penuh dengan insiden pertempuran terutama terjadinya pertempuran di Surabaya dan Ambarawa. Pertempuran yang terjadi telah menyadarkan SEAC (South East Asia Command). Komandan SEAC, Lord Mountbatten berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan bukan hanya cetusan dari segelintir orang yang dianggap berbau Jepang, tetapi merupakan dampak dari arus nasionalisme yang telah berkembang di Indonesia.³

Nasionalisme yang didukung oleh rakyat dan pemuda Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemuda dianggap menjadi inti pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajahan Belanda. Perjuangan yang dilakukan para pemuda merupakan bukti bahwa mereka bersedia membela tanah air Indonesia dengan ikhlas. Hal itu menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam panggung politik Republik Indonesia. Pada awalnya pemuda-pemuda Indonesia meyakini bahwa

³ Mani,PRS. (1989). *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.hal 35

kemerdekaan sepenuhnya hanya dapat dicapai dengan perjuangan bersenjata.

Pada perkembangan selanjutnya pemuda menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat dipertahankan dengan perjuangan bersenjata saja. Perjuangan juga memerlukan perundingan diplomasi. Peristiwa pertempuran di Surabaya dan Ambarawa merupakan salah satu politik yang digunakan pada pemerintahan Soekarno-Hatta untuk melawan pemerintahan Belanda. Peristiwa tersebut telah membawa hasil, pada tanggal 10 November 1945 tentara Inggris-India dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia. Inggris-India tidak dapat menguasai kota Surabaya dan Ambarawa lagi.⁴

Kekalahan pasukan Inggris membawa akibat serta ancaman bagi Pemerintah Belanda atas kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Van Mook yang menyadari situasi tersebut, sistem politik Belanda di Indonesia yang harus diperbaiki. Menurutnya pertempuran Ambarawa dan Surabaya merupakan kemelut di bidang politik yang harus diatasi. Jika hal tersebut tidak bisa diatasi maka akan berakibat buruk bagi masa depan Indonesia, dalam hal kerjasama membangun bangsa. Van Mook menawarkan suatu cara untuk mengatasi kemelut politik tersebut dengan perundingan perunding dengan Belanda. Perundingan yang ditawarkan oleh Van Mook tidak begitu saja diterima oleh Soekarno-Hatta. Kemudian Soekarno-Hatta mengajukan syarat untuk dilakukan perundingan jika pemerintahan

⁴ Ide Anak Agung Gede Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 1995, hlm. 34.

Belanda mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu keadaan politik juga dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan dalam tubuh pemerintahan Indonesia, yakni antara Tan Malaka-Subardjo terhadap Soekarno-Hatta.

Perebutan kekuasaan terjadi karena saat itu sistem pemerintahan belum teratur. Soekarno-Hatta memaksakan menggunakan sistem kabinet presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial tersebut tidak memberikan kepuasan Tan Malaka-Soebardjo. Sistem pemerintah Presidensial yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta dianggap otoriter. Adanya ketidakpuasan atas sistem pemerintahan presidensial dipandang oleh Tan Malaka dan Subardjo sebagai sesuatu kekosongan politik. Syahrir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri menyadari jika politik Tan Malaka-Subardjo yang bersifat sosialis tersebut berkembang dalam Republik Indonesia akan menciptakan situasi yang berbahaya untuk mendapatkan simpati dari dunia internasional.

Politik sosialis Tan Malaka-Soebardjo tersebut tidak disukai banyak orang yang berada di dalam Republik Indonesia. Dalam perkembangannya selanjutnya ternyata Soebardjo-Tan Malaka makin berhasil menciptakan sesuatu partai politik sosialis yang otoriter yang terorganisasi secara birokratis. Bersamaan usaha Tan Malaka dan Subardjo untuk merebut kekuasaan, terjadi juga perkembangan politik lain yang punya akibat jangka panjang yang jauh lebih besar. Hal ini diyakini Syahrir tidak akan memberikan perkembangan politik yang lebih baik

untuk masa depan Bangsa Indonesia. Mahasiswa banyak yang tidak puas akan pola pemerintahan darurat pimpinan Soekarno-Hatta. Ketidakpuasan bermula dari susunan kabinetnya.

Mahasiswa beranggapan bahwa orang-orang yang bekerja dalam kabinet tersebut memiliki jabatan tinggi pada zaman Jepang. Syahrir dan kelompoknya yang kontra dengan proklamasi 17 Agustus khawatir terhadap deklarasi Soekarno-Hatta yang dianggap terlalu lemah untuk membawa rakyat Indonesia ke puncak revolusi melawan Belanda. Syahrir menghendaki sistem pemerintahan Presidensial Soekarno-Hatta harus diubah. Untuk menyelamatkan situasi politik yang tidak stabil dimasa pemerintahan Soekarno-Hatta, beberapa tokoh seperti: Supeno, Sukarni, Subadio, Ir. Sakirman dan suami istri Mangungsarkoro serta semua anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) telah bekerjasama memberikan dukungan kepada Syahrir. Mereka membuat rencana untuk mengubah sistem pemerintahan Presidensial menjadi pemerintahan Parlementer. Syahir berkeinginan, kekuasaan legislatif berada di tangan KNIP. Taktik Syahir tersebut bertujuan untuk menjatuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Perubahan sistem pemerintahan ini ternyata ditentang oleh Soekarno maupun Hatta. Soekarno-Hatta bersedia memenuhi dan menyetujui usul KNIP dilimpahi kekuasaan legislatif penuh.⁵ Ini berarti bahwa semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui KNIP

⁵ George MC Turnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi, Pustaka Sinar Harapan*, 1995 hlm. 190.

maupun presiden. Semua kekuasaan telah dilimpahkan kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

KNIP mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan. KNIP yang telah dilimpahi kekuasaan penuh segera memilih Syahrir dan Sjarifoeddin untuk menjadi ketua dan wakil ketua badan pekerja KNIP. KNIP mempunyai hak untuk memilih 13 anggota lainnya. Ketiga belas anggota tersebut adalah Soetan Syahrir, Mr. Amir Syarifoeddin Prawiranegara, Kyai Wachid Hasjim, Mr. R. Hendromartono, Dr. R.M. Sunario Kolopaking, Dr. A. Halim, Subadio Sastrosatomo, Mr. Tamling Djie, Supeno, S. Mangunsarkoro, Adam Malik, dan Dr. Sudarsono, semua yang dipilih mendapatkan pendukung yang kuat solid.

Kebanyakan dari mereka pernah aktif dalam gerakan bawah tanah anti-Jepang. Semua berjumlah 15 orang badan pekerja S. Mangunsarkoro, Adam Malik, Tajaludin dan Dr. Sudarsono. Semua yang dipilih merupakan pendukung kuat. Kebanyakan dari mereka pernah aktif dalam gerakan bawah tanah anti Jepang. Semuanya berjumlah 15 anggota badan pekerja.⁶ Setelah Syahrir ditunjuk sebagai ketua, terjadi perubahan pada badan pekerja KNIP, situasi politik menjadi tidak stabil. Keinginan Syahrir dan para pengikutnya untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari penyimpangan pemerintah yang otoriter dan organisasi politik yang otoriter dan totaliter tidak berhasil. Pada prinsipnya perubahan dibidang

⁶ *Ibid*, hlm.76

pemerintahan dijadikan sarana untuk mencapai tujuan akhir politik. Dibalik kebijakan ini, masih ada suatu pertimbangan yang penting namun jelas bersifat sekunder, yaitu keinginan untuk sedapat mungkin menghapus noda kolaborator dari pemerintahan. Syahrir yakin bahwa cara ini akan memperkuat kedudukan Internasional Republik ini dalam berunding dengan Belanda.

Sejak Syahrir menjadi Perdana Menteri semua sistem pemerintahan berubah. Pada tanggal 14 November 1945 Kabinet Soekarno-Hatta mengundurkan diri kemudian sistem pemerintahan diganti dengan sistem Demokrasi Parlementer, yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada KNIP. Akan tetapi pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena keadaan yang mendesak maka perubahan ini tetap dilaksanakan. Dalam hal ini Presiden Soekarno tetap berfungsi sebagai Presiden begitu juga dengan Hatta tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Syahrir yang diangkat menjadi Perdana Menteri juga ditugaskan menjadi Menteri Luar Negeri karena mempunyai tanggung jawab dalam semua urusan pemerintahan kepada KNIP, pada masa itu KNIP dianggap sebagai parlemen.

Perubahan struktur pemerintahan RI ini ternyata memberi kepuasan kepada Van Mook, sebab yang akan menjadi mitra dalam pembicaraan antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Republik Indonesia adalah Sutan Syahrir bukan Soekarno dan kawan-kawannya.

Sutan Syahrir dapat diterima oleh Belanda, selain beliau termasuk golongan moderat pernah juga mengenyam pendidikan di Belanda dikalangan Republik Indonesia, beliau juga tidak pernah berkolaborasi dengan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa. Bahkan beliau menyembunyikan diri dan mengumpulkan pemuda-pemuda yang menentang fasisme Jepang. Maka dengan latar belakang figur Sutan Syahrir ini Van Mook mempunyai harapan besar bahwa dalam masa yang akan datang pembicaraan atau perundingan antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia akan dapat dilangsungkan.⁷

Sutan Syahrir yang memiliki tanggung jawab atas kekuasaan di pemerintahan banyak didukung oleh pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia menghendaki, adanya perubahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemuda sebenarnya hanya menghendaki tercapainya seratus persen kemerdekaan Indonesia. Menurut Syahrir bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan terlebih dahulu masalah-masalah yang menyangkut politik Indonesia harus diselesaikan. Jika ingin mendapatkan pengakuan Internasional, situasi politik dalam negeri harus stabil sehingga bisa menarik simpati dunia Internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah situasi politik stabil dan mendapat pengakuan dunia Internasional maka perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan dimaksudkan untuk meletakkan dasar kerjasama antara Republik Indonesia dengan Pemerintahan Belanda dikemudian hari.

⁷ *Ibid*, hlm.130

C. Pemilihan Jalan Diplomasi

a. Pihak Republik Indonesia

Pertempuran yang terjadi terus menerus setelah Indonesia merdeka akan membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan tidak dapat dirasakan. Oleh rakyat jika pemerintah tidak dalam keadaan damai. Memang tidak dapat disangkal pertempuran-pertempuran tidak dapat dihindari. Hal itu terjadi karena adanya rasa semangat nasionalisme dan kesadaran rakyat untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Sejak awal Soekarno-Hatta selalu memilih penyelesaian dengan cara damai, baik ketika menghadapi Jepang maupun Belanda. Bagi pemuda, sikap ini kadang dianggap sikap pengecut dan lemah mendorong Syahrir untuk ikut berperan dalam pemerintahan.⁸ Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia menyadari untuk mempertahankan kemerdekaan tidak selamanya dengan perjuangan bersenjata. Sementara itu Sutan Syahrir diperkuat dan membentuk kabinet baru tampil dalam perjuangan politik setelah membentuk kementerian nasional.

Jika perjuangan bersenjata tersebut dapat digunakan dalam persengketaan antara Indonesia-Belanda tidak akan ada penyelesaian karena kalah persenjataan. Ketika pemerintahan Presidensial diubah menjadi pemerintahan Demokrasi Parlementer. Pada masa itu kekuasaan politik dijalankan oleh Sutan Syahrir. Beliau lebih memilih perjuangan perundingan atau juga disebut politik diplomasi dalam mempertahankan

⁸ Dr.A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Periode Linggarjati*, Penerbit Angkasa Bandung, hlm.4

kemerdekaan, parlementer banyak yang menentang terutama bagi golongan sosialis dan golongan kanan di dalam negeri.

b. Pihak Pemerintah Belanda

Pidato Wilhelmina, sesudah Perang Pasifik akan menjadi dasar langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Belanda untuk memulai suatu dialog dengan wakil-wakil Indonesia. Menteri jajahan se usai Perang Pasifik ketika itu, Logemann berpendapat bahwa kebijakan Belanda setelah Perang harus ditunjukkan ke pengakuan nasionalisme Indonesia. Sekalipun Logemann menyadari nasionalisme di Indonesia jauh dari matang. Berbeda dengan Van Starckenborg Stachouwer berpendapat lain, ia tetap pada pendiriannya bahwa kebijakan ketatanegaraan harus bersambung dengan masa lalu. Perubahan hanya dilakukan secara sedikit demi sedikit dengan hati-hati, dengan Belanda bersifat menentukan dan ia sangat menentang dirangsanya cita-cita politik terutama diadakannya pembicaraan dengan para pemuka Indonesia. Perbedaan mendasar dalam pendirian Logemann dan Van Starckenbrog, mengakibatkan pada tanggal 11 Oktober 1945 Van Starckenbrog mengundurkan diri.⁹

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Belanda membebaskan Letnan Gubernur Jendral Dr. H.J. van Mook sebagai pemerintah umum dan wali negara di Hindi Belanda. Melihat karir politik Van Mook adalah orang yang pilihannya paling tepat karena selain telah lama menjadi pejabat di Indonesia juga dapat menilai persoalan setelah perang di Indonesia.

⁹ Ide Anak Agung Gde Agung. *Renville*. Jakarta:Penerbit SinarMas,1983 ,hlm.23

Dengan adanya Van Mook yang telah lama tinggal di Indonesia dan memahami kondisi masyarakat Indonesia, tentu sangat membantu untuk dapat diterima oleh pihak wakil-wakil Republik.